



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : KPW TOKYO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **IMADUDDIN SAHABAT**
2. Jabatan : **KEPALA PERWAKILAN**
3. NHK : **245834**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **8.210.000.000**

1. Tanah Seluas 1.924 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 2.600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/54 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
4. Tanah Seluas 1.926 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI Rp. 580.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 34 m2/29 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 630.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 268 m2/90 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **453.000.000**

1. MOBIL, HONDA CRV SUV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO BEBEK Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOBIL, HONDA BRV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **112.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.586.140.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	14.361.140.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	14.361.140.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.